

Innovative Governance Dalam Pengembangan Program Desa Mandiri Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung

Ni Nyoman Citra Rahayu Trisna Ari Canti ^{*a}, I Ketut Winaya ^a, I Dewa Ayu Putri Wirantari ^a

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

*Corresponding author: citrarahayuaricanti@gmail.com

Abstract

Bongkasa Pertiwi Village is one of the villages that is developing innovation by utilizing the village's potential for community welfare. However, during the implementation of the Independent Village Program there were still problems that occurred, such as: a lack of policies governing innovation, a lack of community understanding and participation, and the existence of community groups that no longer carried out activities. This research aims to determine the Innovative Governance carried out in the development of the Independent Village Program in Bongkasa Pertiwi Village. The problem study uses indicators of Innovative Governance theory proposed by Rogers in Suwarno (2008). The research is a type of descriptive qualitative research. The author obtained data by conducting interviews, observations and documentation which were then analyzed using the Miles and Huberman analysis model. The research results show that the development of the Independent Village Program in Bongkasa Pertiwi Village can be categorized as Innovative Governance or innovative governance. However, the Bongkasa Pertiwi Village government still needs to make improvements to increase community participation and understanding. This can be achieved by improving governance through increasing collaboration and program evaluation.

Keywords: *Independent Village, Innovative Governance, Sustainable Development*

1. Pendahuluan

Innovative governance merupakan tata kelola pemerintahan yang dilakukan untuk menciptakan inovasi baru dalam memecahkan permasalahan publik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017 menyebutkan inovasi sebagai perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dengan melakukan peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, peningkatan partisipasi masyarakat serta penciptaan daya saing dalam suatu instansi maupun daerah. Pelaksanaan inovasi pemerintahan harus disesuaikan dengan potensi-potensi yang dimiliki dalam suatu wilayah untuk dapat membantu percepatan pembangunan yang terjadi di suatu wilayah.

Pembangunan wilayah dengan menerapkan prinsip innovative governance akan membantu dalam meningkatkan kualitas pembangunan yang didasarkan pada kemampuan pemerintah dalam memberikan inovasi untuk menciptakan suatu produk pelayanan (Khairul Muluk, 2008). Pembangunan wilayah memberikan kesejahteraan pada masyarakat untuk memiliki kehidupan yang lebih baik tanpa mengorbankan apapun. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan pada suatu wilayah baik dari lingkup wilayah paling tinggi hingga lingkup wilayah terkecil. Desa dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan wilayahnya sendiri dengan menyesuaikan potensi dan kondisi wilayah masing-masing sesuai dengan kebijakan yang termuat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberi kewenangan kepada desa untuk menjalankan pemerintahan desa.

Berkaitan dengan adanya kewenangan dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah, pemerintah melalui Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menciptakan Program Inovasi Desa sebagai acuan pemerintah desa untuk meningkatkan pembangunan dengan melakukan tata kelola pemerintahan yang inovatif. Dengan inovasi yang dilakukan diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, sejahtera dan mandiri, memenuhi kebutuhan ataupun penyelesaian masalah publik.

Desa Bongkasa Pertiwi merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Badung dan melakukan tata kelola pemerintahan yang inovatif. Implementasi pemerintahan inovatif dilakukan pemerintah desa dengan membuat Program Desa Mandiri yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Program Desa Mandiri yang dijalankan pemerintah desa memiliki beberapa kegiatan yang dikembangkan dengan memiliki fokus yang berbeda-beda. Adapun kegiatan yang dikembangkan dalam Program Desa Mandiri sebagai implementasi tata kelola pemerintahan inovatif yaitu: 1) pembangunan PAM desa yang memiliki 545 sambungan yang tersebar diseluruh banjar; 2) pembangunan biogas sebagai energi terbarukan; 3) budi daya madu kela-kela yang menghasilkan produk madu; 4) adanya pengelolaan daur ulang sampah plastik dan bank sampah; 5) kegiatan penangkaran burung jalak; serta 6) kegiatan ketahanan pangan yang dilakukan dengan kegiatan pertanian sehat dan pengolahan makanan.

Meskipun dalam pengembangan Program Desa Mandiri sudah mendapatkan penghargaan “Desa Mandiri” serta memberikan inovasi kegiatan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi yaitu: kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan, kurangnya kebijakan yang mengatur secara khusus program desa mandiri; minimnya kualitas sumber daya manusia yang berkompeten; terdapat kelompok yang tidak lagi menjalankan kegiatan inovasi; serta adanya masyarakat yang terkendala dalam membayar iuran kegiatan.

Sebagai implementasi dalam tata kelola pemerintahan yang inovatif, maka pengembangan Program Desa Mandiri di Desa Bongkasa Pertiwi harus disesuaikan dengan indikator tata kelola pemerintahan inovatif. Sehingga dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam pengembangan program inovasi desa menjadikan penulis tertarik untuk membuat penelitian yang mengkaji mengenai “*Innovative Governance* Dalam Pengembangan Program Desa Mandiri Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan innovative governance dalam pengembangan Program Desa Mandiri di Desa Bongkasa Pertiwi.

2. Kajian Pustaka

Innovative Governance

Tata kelola pemerintahan inovatif atau *innovative governance* merupakan penciptaan ide dan gagasan baru yang dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan. Innovative governance memberikan suatu perubahan dan perbaikan yang berkaitan dengan kebijakan maupun pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah atau suatu organisasi (Bartos dalam Sangkala, 2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017 mendefinisikan inovasi sebagai suatu perubahan yang dilakukan penyelenggara pemerintah dengan memberikan pemberdayaan, peningkatan pelayanan, maupun peningkatan partisipasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. tata kelola pemerintahan yang inovatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan publik dengan menciptakan gagasan atau ide baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi dalam pelaksanaannya

memiliki ciri khas atau karakteristik yang disebut dengan atribut inovasi. Adapun indikator *innovative governance* yang mengacu pada karakteristik inovasi menurut Rogers dalam Suwarno (2008) yaitu:

a. *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif)

Inovasi memberikan keuntungan dan nilai lebih jika dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Serta memiliki nilai kebaruan sehingga dapat membedakan dengan lainnya.

b. *Compatibility* (Kesesuaian)

Inovasi memiliki sifat kompatibel dengan inovasi sebelumnya. Kesesuaian inovasi dilakukan agar tidak menghilangkan keseluruhan inovasi sebelumnya sehingga memberikan transisi dan pembelajaran terhadap inovasi.

c. *Complexity* (Kerumitan)

Suatu inovasi memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun inovasi memberikan cara baru yang lebih baik, sehingga kerumitan yang dimiliki bukan menjadi masalah.

d. *Triability* (Kemungkinan Dicoba)

Inovasi dapat diterima dan dijalankan jika sudah teruji dan terbukti memberikan keuntungan atau nilai tambah jika dibandingkan inovasi sebelumnya.

e. *Observability* (Kemudahan Diamati)

Inovasi yang dijalankan diwajibkan untuk dapat diamati oleh seluruh pihak.

Desa Mandiri

Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PD TT) No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, menyebutkan bahwa Desa Mandiri merupakan desa maju yang memiliki kapasitas untuk melakukan pembangunan yang bertujuan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan ketahanan ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan. Pelaksanaan desa mandiri dapat memberikan manfaat kepada suatu wilayah untuk melakukan berkembangnya potensi-potensi yang dimiliki, meningkatkan kegiatan usaha masyarakat lokal ataupun meningkatkan kemandirian desa dalam pembangunan dan pengembangan desa. suatu desa dapat dikatakan sebagai desa mandiri jika memiliki indikator (Ahmad Taufik, 2019) diantaranya:

1. Desa memiliki potensi sumber daya alam;
2. Potensi sumber daya manusia yang memadai;
3. Memiliki ciri khas dalam pengembangan produk unggulan desa
4. Memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa;
5. Adanya kesadaran serta partisipasi masyarakat untuk meningkatkan potensi desa secara optimal.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan fenomena-fenomena manusia maupun sosial yang disajikan dalam narasi dengan memberikan penjelasan pandangan informan yang sesuai dengan kejadian

sebenarnya (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015). Dalam mendapatkan informasi yang dapat digunakan dalam mendukung penelitian ini, penulis menetapkan informan yang ditentukan melalui teknik *nonprobability sampling*. Informan yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu: Kepala Desa Bongkasa Pertiwi, Kepala BUMDes Mandala Sari Bongkasa Pertiwi, kelompok masyarakat (Kehati Pertiwi Lestari, Sarining Trigono Pertiwi, Eco Pertiwi, Manik Pertiwi) serta masyarakat Desa Bongkasa Pertiwi.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui: 1) data primer yang didapatkan melalui wawancara dan observasi serta 2) data sekunder yang berasal dari dokumentasi pada buku, artikel ilmiah, maupun dokumen penting. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Yusuf, 2019). Data yang diperoleh dalam penelitian disajikan dalam bentuk naratif, tabel, serta gambar.

4. Hasil Dan Pembahasan

Pengembangan Program Desa Mandiri Di Desa Bongkasa Pertiwi

Desa Bongkasa Pertiwi dalam mengimplementasikan *innpative governance* atau tata kelola pemerintahan inovatif dilakukan dengan membuat suatu program yang disebut Program Desa Mandiri. program ini dijalankan selaras dengan adanya visi misi pemerintah Desa Bongkasa Pertiwi yaitu “Terwujudnya Desa Bongkasa Pertiwi Yang Santhi (Sejahtera, Akuntabel, Nyaman, Transparan, Harmonis dan Indah) Berlandaskan Tri Hita Karana”. Pengembangan Program Desa Mandiri yang ada di Desa Bongkasa Pertiwi dilakukan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di wilayah desa untuk dikembangkan kedalam kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan potensi yang ada.

Pengembangan program ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian desa terhadap pengembangan potensi dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pengembangan Program Desa Mandiri menjadikan Desa Bongkasa Pertiwi mendapatkan penghargaan sebagai “Desa Mandiri” oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) tahun 2022.

Program Desa Mandiri memiliki beberapa kegiatan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat desa dengan menyesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada. Terdapat enam kegiatan inovasi yang dikembangkan untuk dapat mencapai pengembangan Program Desa Mandiri. inovasi kegiatan yang dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Bongkasa Pertiwi diantaranya, sebagai berikut.

Pertama, Pembangunan unit PAM Desa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Pembangunan PAM Desa dilakukan dengan memanfaatkan sumber mata air yang ada di desa. *Kedua*, Pembangunan biogas yang dilakukan oleh pemerintah desa dilakukan untuk membantu masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan limbah ternak menjadi energi yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa. *Ketiga*, Pembangunan budi daya madu kela-kela dilakukan pemerintah desa bersama BUMDes untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat akibat pandemi covid-19.

Keempat, Kegiatan daur ulang sampah plastik dilakukan sebagai pengembangan terhadap kegiatan bank sampah dan menciptakan produk-produk kerajinan dari sampah plastik. *Kelima*, Penangkaran burung jalak yang dilakukan bertujuan untuk mengembangbiakkan burung jalak yang hampir punah dan langka. *Keenam*, Kegiatan ketahanan pangan dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh dan memiliki bahan-bahan pokok

Berdasarkan penjabaran tersebut, Program Desa Mandiri yang dijalankan pemerintah desa terdiri dari 6 kegiatan inovasi. Kegiatan yang dilakukan merupakan hasil musyawarah yang dilakukan dengan masyarakat untuk mempertimbangan pengembangan program dengan usulan masyarakat. Dalam pengembangan program ini diharapkan dapat memberikan keuntungan atau dampak yang bersifat positif seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Hasil Temuan

Penulis dalam melakukan analisis temuan penelitian menggunakan indikator *Innovative Governance* yang mengacu pada atribut inovasi yang dikemukakan oleh Rogers dalam Suwarno (2008). Berikut merupakan analisis hasil temuan berdasarkan hasil masing-masing indikator.

a. Keuntungan Relatif

Suatu inovasi memberikan keuntungan yang dapat dirasakan oleh pihak pelaksana kegiatan inovasi. Inovasi juga memberikan nilai kebaruan yang dapat dijadikan sebagai pembanding dengan inovasi sebelumnya. Keuntungan yang diperoleh oleh pihak penyelenggara kegiatan inovasi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk mengikuti dan menjalankan inovasi.

Keuntungan yang didapatkan oleh Desa Bongkasa Pertiwi semenjak menjalankan Program Desa Mandiri dibagi menjadi beberapa sektor, yaitu: internal pemerintah desa; lingkungan; ekonomi; dan sumber daya manusia. Meskipun sudah memberikan keuntungan yang positif, program desa mandiri masih perlu adanya peningkatan.

Pertama, keuntungan bidang internal pemerintah desa. Dengan pengembangan Program Desa Mandiri dapat mewujudkan visi misi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desa. Selain itu, dengan adanya program tersebut pemerintah desa dapat meningkatkan kemandirian desa untuk mengelola wilayah dan potensi desa. Serta keuntungan yang didapatkan yaitu adanya peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kedua, keuntungan pada bidang lingkungan. program desa mandiri bongkasa pertiwi memiliki kegiatan yang mengarah pada kondisi lingkungan. Setelah adanya program inovasi yang dijalankan, berdampak pada penataan lingkungan desa yang lebih tertata. Selain itu, membantu dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalisir pencemaran lingkungan.

Ketiga, keuntungan pada bidang ekonomi. Kegiatan inovasi yang ada memberikan keuntungan kepada masyarakat untuk memiliki pendapatan tambahan dari hasil penjualan. Dengan pembukaan lahan serta adanya kegiatan baru dengan pemanfaatan potensi dapat dijadikan sebagai salah satu tujuan wisata sehingga berpengaruh terhadap penciptaan usaha-usaha baru bagi masyarakat.

Keempat, keuntungan pada sumber daya manusia. Inovasi kegiatan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap kegiatan baru yang dapat memberikan pemahaman baru kepada masyarakat sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman masyarakat. Dengan pengembangan Program Desa Mandiri juga merupakan wujud dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah desa.

Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan penulis terkait indikator keuntungan relatif, dapat disimpulkan bahwa indikator keuntungan relative sudah berhasil terpenuhi. Dengan pengembangan program desa mandiri, menjadikan Desa Bongkasa Pertiwi sebagai Desa Mandiri dengan pengembangan potensi secara mandiri yang dilakukan.

b. Kesesuaian

Pengelolaan pengembangan Program Desa Mandiri yang dijalankan di desa bongkasa pertiwi harus disesuaikan dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku di masyarakat. Pelaksanaan pengelolaan Program Desa Mandiri di masyarakat sudah disesuaikan adanya nilai-nilai atau aturan yang berlaku. Inovasi yang dilakukan tidak boleh merusak dan bertentangan dengan nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat (Sugeng Prasetyo, dkk, 2017). Sehingga pemerintah desa sebelum menetapkan program inovasi tentu melakukan pengenalan atau musyawarah terkait dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait program dan kegiatan yang akan dijalankan.

Sebelum menetapkan program inovasi, pemerintah desa melakukan musyawarah kepada masyarakat untuk menerima usulan dan pendapat masyarakat mengenai program inovasi yang akan ditetapkan di desa. Selain adanya nilai di masyarakat, pemerintah desa dalam merancang program inovasi disesuaikan dengan visi misi pemerintah yang dijadikan sebagai landasan dasar penetapan kegiatan inovasi.

c. Kerumitan

Inovasi dalam pelaksanaannya memiliki kerumitan yang dapat menjadi hambatan dalam pengembangan kegiatan. Suatu inovasi yang dijalankan tidak dapat berjalan secara mulus atau tanpa hambatan, hal ini berkaitan dengan sifat inovasi yang memiliki berbagai resiko termasuk resiko kegagalan jika diterapkan (Suwarno, 2008). Pengembangan program inovasi di Desa Bongkasa Pertiwi sudah berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan bagi masyarakat. namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala atau hambatan yang dirasakan.

Pertama, adanya hambatan yang berkaitan dengan masih minimnya partisipasi masyarakat dalam ikut berpartisipasi mengembangkan program inovasi. Cooper dalam Suwarno (2008) partisipasi publik diperlukan dalam pemberian pelayanan ataupun inovasi. Sehingga dalam hal ini, masyarakat desa bongkasa pertiwi belum secara aktif untuk berpartisipasi dalam pengembangan program.

Kedua, hambatan yang berkaitan dengan masih kurangnya pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat yang masih kurang dalam mengembangkan program sehingga program yang dijalankan belum secara maksimal untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

d. Kemungkinan Dicoba

Suatu inovasi yang ditetapkan dan dijalankan harus memenuhi kriteria untuk dapat diterima oleh seluruh pihak. Selain itu, perlu adanya uji coba terkait program inovasi untuk dapat mengetahui kualitas atau keuntungan yang akan diberikan. Dengan mudahnya masyarakat mengamati serta adanya uji coba akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Implementasi indikator triability dalam Program Desa Mandiri di Desa Bongkasa Pertiwi diwujudkan dengan adanya kick off atau pengenalan program kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah melakukan musyawarah serta pemberian pelatihan kepada masyarakat untuk dapat melihat dan menguji program yang akan dijalankan di masyarakat.

e. **Kemudahan Diamati**

Observability merupakan indikator yang menyebutkan inovasi yang dijalankan harus dapat dengan mudah untuk diamati yang berkaitan dengan proses, pelaksanaan, maupun bagaimana inovasi dapat memberikan hasil atau keuntungan yang lebih baik (Suwarno, 2008).

Kemudahan mengamati dalam Program Desa Mandiri dapat dilihat dari hasil yang diperoleh selama melakukan kegiatan inovasi. Pengembangan program inovasi tersebut memberikan hasil yang positif terhadap masyarakat sehingga dapat dengan mudah untuk diamati. Hasil yang diperoleh dalam program inovasi seperti pada adanya pengelolaan sampah yang terstruktur, penyediaan air bersih bagi masyarakat, pengelolaan sampah plastik dan limbah ternak, sehingga hasil tersebut dapat dilihat secara langsung.

Selain adanya hasil yang dapat diamati, indikator kemudahan diamati dapat dilihat berdasarkan penyebaran informasi yang dilakukan. Pengembangan Program Desa Mandiri Bongkasa Pertiwi, pemerintah bersama dengan kelompok masyarakat memberikan informasi pemahaman mengenai kegiatan inovasi yang dilakukan dengan cara pemasangan spanduk atau dengan menyediakan papan informasi.

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis teori Innovative Governance yang dikemukakan oleh Rogers dalam Suwarno (2008), pengembangan Program Desa Mandiri di Desa Bongkasa Pertiwi, dapat dikategorikan sebagai tata kelola pemerintahan yang inovatif. Desa bongkasa pertiwi dalam pengembangan program desa mandiri melakukan inovasi dengan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa. Meskipun sudah dapat mengembangkan program dengan baik, pemerintah Desa Bongkasa Pertiwi masih perlu melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap pengembangan program khususnya dalam peningkatan dalam partisipasi masyarakat serta memfasilitasi pelatihan dalam Program Desa Mandiri.

Saran

Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan berdasarkan pada penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah desa bongkasa pertiwi diharapkan dapat mengoptimalkan pengembangan Program Desa Mandiri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelatihan-pelatihan.
2. Pemerintah Desa Adat Bongkasa Pertiwi dapat memberikan peran yang lebih optimal dalam pengembangan program dengan memberikan arahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam program.
3. Masyarakat Desa Bongkasa Pertiwi diharapkan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pengembangan Program Desa Mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Peneliti lain diharapkan dapat memberikan pengembangan terhadap penelitian ini untuk menciptakan temuan yang semakin optimal.

Daftar Pustaka

- Bali Post. 2020. "Kampung Mandiri Di Desa Bongkasa Pertiwi". Balipost.com. Diakses 6 September 2023: <https://tinyurl.com/balipostBongkasaPertiwi>
- Desa Bongkasa Pertiwi. 2023. Desa Bongkasa Pertiwi Kabupaten Badung. Diakses 6 September 2023: <https://desabongkasapertiwi.badungkab.go.id/>.
- Desa Bongkasa Pertiwi. 2023. Profil Desa Bongkasa Pertiwi. Diakses 6 September 2023: <https://youtu.be/spUaeMQN9sA?si=faP6sV-xk382Y5Kq>.
- Desa Bongkasa Pertiwi. 2023. Profil Desa Dan Kelurahan Potensi Desa Dan Kelurahan.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2023. Desa Wisata Bongkasa Pertiwi. Diakses 6 September 2023: <https://tinyurl.com/jadestaBongkasaPertiwi>.
- Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa
- Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Pemberian Penghargaan Desa Dengan Status Mandiri Tahun 2022
- Muluk, Khairul. 2008. *Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing dan Lembaga Penerbitan & Dokumentasi FIA-UNIBRAW.
- Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Di Kabupaten Badung
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
- Prasetyo, Sugeng, dkk. 2017. *Inovasi Untuk Mewujudkan Desa Unggul Dan Berkelanjutan*. Jakarta: Frederich-Ebert-Stiftung Kantor perwakilan Indonesia.
- Sangkala. 2014. *Innovative Governance: Konsep dan Aplikasi*. Surabaya: Capiya Publisshing.
- Surat Keputusan Bupati Badung No. 1067 Tahun 2003 Tentang Pemekaran Desa Bongkasa Pertiwi
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi Di Sektor Publik*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi - Lembaga Administrasi Negara Press.
- Taufik, Ahmad. 2019. *Menuju Desa yang Mandiri*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Walidin,. Saifullah, & Tabrani. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. FTK Ar-Raniry Press.
- Yusuf, A. Muri. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.